

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, (Aceh: Bayumedia Publishing, 2011).
- Amir Ilyas dan Jupri. Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahanannya, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Bambang Julianto. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unversitas Islam Indonesia, 2020).
- CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).
- Effendi Tolib. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Eko Soponyono. Kapita Selekta Hukum Pidana: Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban (Dilengkapi Dengan Bahan Kajian Perbandingan), (Semarang: Pohon Cahaya, 2012).
- Firman Wijaya. Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Penaku 12.01.16, 2012).
- I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017).
- I Wayan Parthiana, dkk. Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (UNTOC GAP Analysis), (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2010).
- J.E. Sahetapy. Victimologi: Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).
- Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Lilik Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, (Bandung: PT. Alumni, 2022).
- Muhadar, dkk. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- M. Syamsudin. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1999).
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabay: Penerbit Bina Ilmu, 1987).
- Retno Ajeng. Membasmi Korupsi, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017).
- R Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001).

Sudarto. Hukum Pidana 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2020).

Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Warso Sasongko. Korupsi, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, 2000)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerja sama;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Jurnal dan Artikel

Abdul Haris Semendawai. Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016, ISSN 2460-1543.

Ahmad Fadlil Sumadi. Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Bambang Sugiri, dkk. Analisis Yuridis Kedudukan Narapidana Sebagai *Justice Collaborator*, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 3 (2021).

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, MMH, Jilid 42 No. 1 Januari 2013.

Dyah Permata Budi Asri. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

Eddy O.S. Hiariej. United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.

Irfan Maulana Muharikin. Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*. Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

M. Iman Santoso. Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, MMH, Jilid 41 No. 3 Juli 2012.

Muhammad Rusli. Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 22 April 2015.

Nella Octaviany Siregar. *Plea Bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Wajah Hukum, 3 (1), 1-9 ISSN 2598-604x Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Rahardian F.N. dan Pujiono. Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/ *Justice Collaborator* (Telaah Yuridis Putusan No. 14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta), Diponegoro *Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Rahmi Dwi Sutanti dan Barda Nawawi Arief. Kebijakan Formulasi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringanan Pidana dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, In *Law Reform*: Volume 8, Nomor 2, Tahun 2013.

R.B. Sularto. Suatu Reorientasi Dalam Studi Tentang Korban Kejahatan. Makalah. (Semarang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996).

Ridwan. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform*: Vol 8, No 1 2012.

Zulkarnain Ridwan. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186.

Website/Internet

Ahmad Sofian. Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya, Binus University Bussiness Law, diakses dari <https://bussines-law.ac.id> pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 11.03.

Black's Law Dictionary, Daring diakses dari <https://thelawdictionary.org/plea-bargaining/> pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 11.07.

Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2005)0 of the Committee of the Ministers to Member states on the protection of witnesses and collaborators of justice (Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 on the 924th meeting of the Ministers' Deputies)

https://www.coe.int/t/dgl/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Rec%202005_9.pdf diakses pada Selasa, 14 April 2021 pukul 13.26.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU Tentang Hukum Acara Pidana, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/62> diakses pada 11 Januari 2023 pukul 12.05 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 09.54 wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/korupsi> diakses pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 10.13 wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 09.47 wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/saksi> diakses pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 10.22 wib

Le Sénat de la République Française, Les Repentis Face à la Justice Penale <https://www.senat.fr/lc/lcl124/lcl240.html> diakses pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 13.20 wib

Putri Ayu Trisnawati. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-tindak-pidana-korupsi/> diakses pada 28 Desember 2022 pukul 21.38 wib.

Republic of Albania, The Assembly Law No. 9205, Dated 15/03/2004 on the Justice Collaborators and Witness Protection <https://www.legal-tools.org/doc/ed5e49/pdf/> diakses pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 13.29 wib.

U.S. Marshals Service. An official website of the United States government. Witness Security | U.S. Marshals Service (usmarshals.gov), diakses pada Minggu 22 Januari 2023 pukul 20.35 wib.

Skripsi/Thesis/Disertasi

Adi Prasetyo. Perlindungan Hukum dan Penanganan Khusus Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Tesis, Universitas Airlangga.

- Athika Salsabilla Harahap. Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Bahrudin Machmud. Analisis Hukum Pidana Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Skripsi, UIN Walisongo.
- Dwinanto Agung Wibowo. Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Irfan Zidni. Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- M.Ali Murtadho. Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Surabaya.
- Muhammad Yani Bahtera. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Taufik Nur Ichsan. Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Zakaria Dahlan. Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.